

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)

Amirotun Sholikhah

Dosen Tetap Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto

Abstract: This study was aimed at revealing society's political behavior on the election of head village in Kutasari, District of Cipari, Cilacap Regency. This study used descriptive qualitative approach and data were collected through observation, in depth interviews, and documentation. It is found that in the election of head village in 2013, most of the voters had affective orientation and only few of them had cognitive orientation – i.e. voters elected their candidate on the bases of like and dislike feeling, not on the bases of candidate's capability. It is also revealed that this behavior was influenced by direct social political environment, namely family, religion, education, and group relation.

Keywords: Political behavior, rural society, head village election.

Abstrak: Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). Pada pemilihan Kepala Desa tahun 2013 mayoritas cenderung berorientasi afektif, hanya sebagian kecil saja yang berorientasi kognitif. Tulisan ini menguraikan fenomena perilaku politik dalam pemilihan Kepala Desa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial politik langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data antara lain dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap dan perilaku politik masyarakat Desa Kutasari dalam pemilihan Kepala Desa umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka ketimbang faktor pengetahuan calon Kepala Desa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut di antaranya adalah keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan mereka.

Kata Kunci: Perilaku Politik, Masyarakat Desa, Pemilihan Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat menyambut

pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dengan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terangnya menyatakan dukungannya ke salah satu calon. Ada pula beberapa yang bersifat tertutup akan tetapi membuktikan partisipasi aktifnya dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon Kepala Desa yang kadang kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput dari praktik-praktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme.

Faktor lingkungan sosial berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat juga bisa dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat.¹

Menurut David Apter, dalam budaya politik masa rakyat mengharapkan para elite pemerintahan dapat mengatur dan menyediakan segala kehidupan rakyat. Akibatnya kepemimpinan pemerintah cenderung mempertajam sentralisasi, seperti monolitik dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kondisi demikian masyarakat hanya aktif bila ada mobilisasi massa untuk patuh mengikuti pimpinan sepenuhnya.²

Bagi masyarakat yang sudah mulai maju dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka.

Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki, baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2006, di antaranya mengatur masa jabatan Kepala Desa. Maka setelah 6

tahun masa jabatan Kepala Desa berakhir, pada bulan Maret tahun 2013 Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan Kepala Desa.

Masyarakat Desa Kutasari memiliki kecenderungan yang variatif dalam menentukan sikap dan perilaku politik selama proses berlangsungnya pemilihan Kepala Desa. Mereka terlihat cukup antusias dalam menyambut datangnya hari pemungutan suara dengan berbagai cara. Di antaranya melalui diskusi-diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja pada waktu berkumpul dengan tetangga. Topik seputar isu nama-nama calon, hingga kualitas serta kredibilitas calon di mata masyarakat rupanya menjadi sebagian dari tema yang dibicarakan.

Desa Kutasari memiliki jumlah pemilih kurang lebih 5017 jiwa, berasal dari 11 RW (Rukun Warga). Adapun wilayah RW 10 masyarakatnya memiliki karakteristik dan kultur yang agak berbeda dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya. Wilayah yang berada dalam kompleks perkebunan PT. Rumpun Sari Antan I, terdiri atas RT 01 dan RT 02 dihuni sekitar 70 Kepala Keluarga, dengan hak pilih kurang lebih 188 jiwa.⁴ Kondisi masyarakat yang cukup heterogen, meskipun tinggal di kompleks perkebunan tetapi mereka terdiri dari berbagai latar belakang strata sosial, serta tingkat pendidikan yang cenderung menengah ke bawah.

Kondisi masyarakat yang demikian, tentu saja dapat menimbulkan kecenderungan pola dan sikap perilaku yang cukup variatif terutama menghadapi proses pemilihan Kepala Desa. Terbukti dari hasil pengamatan peneliti, respon mereka cukup variatif. Mengenai sosok/figur calon, hingga kriteria yang mereka harapkan dari masing-masing calon.

Umumnya mereka mengharapkan adanya calon baru yang nantinya dapat mendatangkan perubahan dan peningkatan di bidang kesejahteraan, sarana prasarana dan lingkungan sosial yang lebih nyaman.

RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan umum tersebut, peneliti merumuskan masalah secara spesifik dan operasional, berdasar pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kecenderungan persepsi, sikap, orientasi dan perilaku masyarakat Desa Kutasari dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2013, pada masa awal, pelaksanaan dan akhir acara pemilihan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik dalam pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Observasi

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara seksama terhadap berbagai fenomena yang menyangkut sikap maupun perilaku politik masyarakat selama proses pemilihan Kepala Desa maupun kejadian yang ada selama menjelang hingga berakhirnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kutasari, Kecamatan Ciapari, Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini dilakukan sejak bulan Januari hingga bulan Maret Tahun 2013 saat pelaksanaan pemungutan suara.

Wawancara mendalam

Persoalan politik selama proses berlangsungnya pemilihan Kepala Desa di suatu wilayah tertentu tidak selalu bisa terekspose oleh media publik. Untuk menggali informasi secara akurat, bisa dilacak melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan salah satu jawaban yang tepat guna memperoleh data yang akurat. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur menuntut kreativitas dan keaktifan pewawancara.⁶

Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin melalui pendekatan persuasif terhadap para responden/informan mengenai hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pola yang fleksibel. Yaitu dilakukan kepada mereka yang benar-benar memahami dan mengalami secara langsung situasi serta proses kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini di antaranya beberapa tokoh serta anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, yang tinggal di RW 10 terdiri dari RT 001 dan 002, Desa Kutasari kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Informan tersebut terdiri atas tokoh agama, pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW, Pegawai Negeri Sipil, petani, buruh, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Dokumentasi

Mengingat data primer saja belum mencukupi, maka penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa teknik dokumentasi.

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter dalam suatu penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan *content analysis*.⁷

Dalam hal ini, penulis memanfaatkan beberapa data yang diperoleh dari kantor kelurahan maupun panitia seperti Data Pemilih Desa Kutasari Tahun 2013, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, sebab menurut Masri Singarimbun, penelitian deskriptif boleh menggunakan atau tidak menggunakan hipotesis.⁹ Oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis tidak mengemukakan hipotesis yang hendak diuji kebenarannya, melainkan upaya pencarian fakta dengan interpretasi yang objektif, guna memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki.

Teknik Pengambilan Sampel

Proses penelitian kualitatif tidak mengenal konsep “keterwakilan” sampel dalam rangka mencapai generalisasi suatu populasi. Prosedur yang digunakan adalah dengan memburu informasi yang memenuhi syarat keleluasaan dan tercakupnya informasi sesuai dengan elemen-elemen pokok permasalahan.¹⁰

Teknik logika *purposive sampling* diterapkan menetapkan informan untuk diwawancarai dan situasi sosial tertentu untuk diobservasi yang memenuhi syarat keterpercayaan dan kemantapan informasi.¹¹

Dalam penelitian ini penulis juga tidak menggunakan teknik *sampling*, melainkan mengambil data dengan menggali informasi kepada beberapa orang yang terdiri dari unsur-unsur yang dipandang cukup mewakili dan mereka berdomisili di wilayah penulis tinggal. Pertimbangan yang diambil adalah faktor kedekatan emosional penulis dengan para informan sehingga informasi mudah digali, situasi dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini tidak asing bagi penulis.

Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹² Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Adapun data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah mempelajari masalah dalam masyarakat tentang hubungan, kegiatan, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.¹³

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴

Dalam penelitian kualitatif kebenaran tidak diukur berdasarkan frekuensi dan variansi, melainkan dilandaskan pada diketemukannya hal-hal yang esensial, intrinsik benar.¹⁵

Jadi yang dimaksud penelitian kualitatif penelitian ini, adalah adanya upaya untuk mengejar kebenaran lewat sumber-sumber terpercaya hingga hal-hal yang hakiki, intrinsik, dan esensial dapat diketemukan dengan serta diusahakan untuk diungkap melalui pendekatan fenomenologi. Antara lain berdasarkan hasil pengamatan, pengumpulan data dan analisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran.

Dalam hal ini, peneliti berupaya mempelajari dan memahami masalah yang berhubungan dengan kecenderungan persepsi, sikap dan perilaku politik dalam memilih Kepala Desa masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2013 khususnya wilayah RT 001 dan 002 RW 010. Studi tentang masalah perilaku politik sebagaimana dikembangkan dalam penelitian ini, analisis ditekankan pada perilaku politik dalam memilih Kepala Desa dalam kaitannya dengan persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan nyata dalam melakukan kegiatan pemberian suara beserta faktor-faktor yang ikut mempengaruhinya. Dengan teknik analisis data seperti itu, permasalahan dan pembahasan mengenai perilaku politik dalam memilih Kepala Desa, masyarakat Desa Kutasari, Kecamatan Ciapari, Kabupaten Cilacap tahun 2013, dapat diuraikan dan digambarkan sejelas-jelasnya dengan pendekatan fenomenologi.

KERANGKA TEORI

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat.¹⁶ Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.¹⁷ Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yaitu fungsi pemerintahan (pejabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun, baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.

Menurut Edikusmayadi, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik.¹⁸ Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya.¹⁹ Perilaku politik (*political behaviour*) dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun contoh perilaku politik adalah:

1. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Ikut serta dalam pesta politik.
4. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas.
5. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
6. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.²⁰

Harold D. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma, memberikan dua catatan penting mengenai perilaku politik. *Pertama*, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. *Kedua*, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.²¹

Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperbutkan; sedangkan dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang pada masa datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa.²²

Yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelis, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologi di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan (individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik). Menurut model ini, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang faktor politik.²³

Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian, terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebu-

tuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *agressor*. Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Aktor lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi secara langsung salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hubungan kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifat *zero sum*: apabila faktor sikap yang menonjol, faktor situasi kurang mengedepan, sebaliknya apabila situasi yang mengedepan, faktor sikap kurang menonjol.

Menurut Epstein dan Rogers (dalam Stenberg, 2008: 105), persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan dan memahami serapan-serapan inderawi yang kita terima dari stimulus lingkungan.²⁴ Adapun Witting (1977 : 76), persepsi adalah proses menginterpretasikan stimulus oleh seseorang (*perception is the process by which a person interprets sensory stimuli*). Persepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman sebelumnya. Robbins (2001 : 89) mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Banyak sosiolog dan psikolog memberi batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindari, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu intuisi, pribadi, situasi, ide, konsep, dan sebagainya (Howard Dan Kendler, 1974, Gerungan, 2000).

Gagne (1974) mengatakan bahwa sikap merupakan suatu keadaan batin (*internal state*) yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi, dan peristiwa. Masih banyak definisi sikap yang lain, akan tetapi keberagaman pengertian tersebut disebabkan oleh sudut pandang dari penulis yang berbeda. Namun demikian, jika dicermati hampir semua batasan sikap memiliki kesamaan pandang, bahwa sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh, dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan, sebagaimana pendapat Piaget tentang proses perkembangan kognitif manusia (Wadworth, 1971).²⁵

Sejalan dengan pengertian sikap di atas, dapat dipahami bahwa:

1. Sikap ditumbuhkan dan dipelajari sepanjang perkembangan orang yang bersangkutan dalam kaitannya dengan objek tertentu,
2. Sikap merupakan hasil belajar manusia, sehingga sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar,
3. Sikap selalu berhubungan dengan objek, sehingga tidak berdiri sendiri,
4. Sikap dapat berhubungan dengan satu objek, tetapi dapat pula berhubungan dengan sederet objek sejenis,
5. Sikap memiliki hubungan dengan aspek motivasi dan perasaan atau emosi (Gerungan, 2000).

Pengertian budaya politik adalah cara berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.²⁶

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3 yaitu:

1. *Orientasi kognitif* – pengetahuan atas mekanisme *input* dan *output* sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.
2. *Orientasi afektif* – perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
3. *Orientasi evaluatif* – keputusan dan pendapat individu tentang objek-

objek politik yang tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu.²⁷

Orientasi kognitif adalah pengetahuan bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap, seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.

Orientasi afektif bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai, Askeskin, pembagian kompor gas, dan sejenisnya bertujuan demi mengubah orientasi afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan pada bab terdahulu, maka dapat diuraikan tentang gambaran sikap, orientasi dan perilaku politik masyarakat Desa Kutasari pada pemilihan Kepala Desa tahun 2013. Analisis akan difokuskan pada sikap dan perilaku politik masyarakat berkaitan dengan proses pelaksanaan PILKADES, dimulai sejak persiapan acara, masa pelaksanaan serta pasca acara pemilihan, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa.

Persepsi Masyarakat Desa Kutasari Tentang Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap delapan anggota masyarakat RW 010 Desa Kutasari, diperoleh gambaran tentang persepsi terhadap pemilihan Kepala Desa sebagai berikut.

1. Agus Sartono, ketua RW 010 Desa Kutasari

Pria lulusan Sekolah Guru Olah Raga (SGO), berusia sekitar 53 tahun dan berprofesi sebagai mandor pabrik ini, berpendapat bahwa, "Seorang Kepala Desa yang pernah menjabat kemudian mencalonkan lagi pada periode

berikutnya, biasanya berpotensi melakukan tindak korupsi, karena yang bersangkutan terkadang masih punya beban untuk mengembalikan biaya pencalonan pada periode sebelumnya kemudian juga harus memikirkan berapa besar modal yang dibutuhkan untuk kampanye pada pencalonan periode berikutnya.” Hal seperti inilah yang bisa memicu timbulnya tindakan yang melanggar peraturan, kecuali jika memang Kepala Desa tersebut sudah benar-benar terbukti bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah teruji kejujurannya.²⁸

Dari pendapat Bapak Agus tersebut, dapat disimpulkan beliau memiliki pandangan bahwa idealnya seorang Kepala Desa itu jangan sampai menjabat terlalu lama, meski Undang-undang memperbolehkan sampai dua kali masa jabatan asal terpilih kembali, namun akan lebih bagus bila terjadi pergantian dalam satu periode masa jabatan. Informan ini tidak mempertimbangkan masalah pengalaman menjabat sebagai sesuatu hal yang positif serta besarnya dana kampanye, melainkan melihat dari sisi peluang untuk terjadinya praktik korupsi lebih besar jika seseorang terlalu lama menduduki jabatan Kepala Desa tersebut.

2. Siswanto

Pria berusia 53 tahun ini menjabat sebagai Ketua RT 001 RW 010 Desa Kutasari, bekerja sebagai Satpam Perkebunan PT. Rumpun Sari Antan I. Persepsi tentang proses pemilihan Kepala Desa, “Jika seorang Kepala Desa yang berkuasa itu ternyata tidak bisa membawa kemajuan, misalnya prasarana dan sarana penduduk seperti jalan yang rusak namun tidak segera mendapat perhatian, maka sudah sepantasnya sang Kepala Desa itu tidak dipilih kembali. Apalagi jika yang bersangkutan diberitakan korupsi.”²⁹

Persepsi informan ini tentang pemilihan Kepala Desa cenderung melihat hasil karya nyata dari Kepala Desa sedang berkuasa. Jika selama menjabat ternyata tidak bisa membawa kemajuan terutama dalam hal sarana prasarana desa, maka sudah selayaknya jika yang bersangkutan diganti/tidak dipilih kembali pada periode kedua.

3. Muhsinun

Pria berusia 44 tahun ini adalah lulusan Madrasah Aliyah, yang bersangkutan juga pernah mondok di salah satu Pesantren di Kota Bantul Yogyakarta. Kelebihan ilmu pengetahuan agamanya ini menempatkan informan tersebut sebagai imam masjid di kompleks Perkebunan PT. Rumpun Sari Antan 1, sehingga mendapat julukan Kyai. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai mandor pabrik. Oleh karena itu, keberadaan yang bersangkutan di lingkungan tempat tinggalnya di kompleks perumahan PT. RSA 1 cukup disegani dan menjadi panutan warga sekitarnya.

Adapun persepsi informan ini mengenai pemilihan Kepala Desa adalah, wanita belum pantas mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengingat keterbatasan fisik yang dimilikinya. Oleh karena seorang Kepala Desa itu dituntut untuk aktif berkomunikasi dengan warga baik siang maupun malam hari, tidak kenal medan dan kondisi geografis. Selain informan cenderung memilih seorang calon laki-laki, informan ini juga lebih memilih calon Kepala Desa yang tidak suka mengingkari janji kampanyenya, seorang yang dipandang mampu membawa kemajuan desa misalnya memperbaiki sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas ibadah terutama masjid.

Ia tidak tertarik memilih kembali jika calonnya adalah pernah menjabat namun terkena isu korupsi, seperti menyalahgunakan bantuan pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi.³⁰ Dari hasil wawancara dengan informan ini, penulis mendapatkan gambaran bahwa, Muhsinin yang lebih dikenal sebagai seorang Kyai daripada mandor pabrik, lebih menekankan perlunya melihat aspek gender dan moral spiritual pada seorang calon Kepala Desa. Hal tersebut bisa dimengerti mengingat keberadaannya sebagai tokoh panutan sehingga apa yang akan menjadi pilihannya juga di contoh para warga masyarakat sekitarnya.

4. Sunarti

Wanita berusia 55 tahun, bekerja sebagai buruh pemetik coklat di perkebunan, tidak sempat menamatkan SD. Ia berpandangan bahwa ketika memilih Kepala Desa nanti, “ingin ganti yang baru”.³¹

Kalau figur lama menurut informan ini sudah ketahuan bagaimana kiprahnya, sehingga ingin melihat dan merasakan suasana kepemimpinan yang baru dari orang yang berbeda dengan sebelumnya. Alasan lainnya tidak disampaikan kepada penulis dengan terbuka.

5. Sudiyono Al Nano

Seorang pensiunan PNS (mantan penjaga SD), berusia 57 tahun, salah seorang Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) TPS 9 yaitu tempat masyarakat RW 010 Desa Kutasari melakukan pencoblosan. Ia memiliki persepsi bahwa, “Setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihan, kalau memang ditimbang-timbang antara kebaikan dan kekurangannya, Kepala Desa yang lalu masih banyak baiknya, maka lebih baik tetap dipertahankan dari pada ganti pemimpin baru yang belum tahu bagaimana kiprahnya.”³² Melihat pernyataan informan ini, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan lebih mengedepankan keberlangsungan kepemimpinan yang sudah ada dibandingkan dengan mengganti yang belum tahu baik buruknya. Hanya saja ukuran baik dan buruk di sini tidak dijelaskan secara rinci oleh

Sudiyono Al Nano. Kebetulan informan ini memang masih ada hubungan saudara dengan Kepala Desa yang sedang berkuasa saat ini. Oleh karena itu, faktor subjektivitas sulit dihindari.

6. Muhidin

Seorang buruh perkebunan, lulusan SLTP ini berusia 40. Ketika ditanyakan masalah persepsinya tentang pemilihan Kepala Desa, penulis tidak menemukan jawaban yang jelas. Pendapat yang ia sampaikan lebih mewakili aspirasi orang banyak terutama di kalangan usia tua. Diperoleh keterangan bahwa bagi kebanyakan orang tua di wilayah RW 010 menganggap bahwa memilih Kepala Desa tidak terpikirkan apakah calon tersebut pintar atau tidak, yang penting orangnya merakyat, kalau ada orang hajatan dia rajin menghadiri, jika ada orang meninggal rajin melayat. Yang penting lagi menurutnya desa itu ada yang memimpin, tidak penting apakah dia intelektualnya bagus atau tidak, yang lebih ditekankan adalah calon Kepala Desa tersebut merakyat.³³

7. Warmi

Wanita berusia 64 tahun, wanita ini berprofesi sebagai pedagang sembako. Pendidikannya memang tidak sampai tamat SD. Persepsinya tentang proses pemilihan Kepala Desa, hendaknya jangan menjadi ajang untuk saling bersitegang bahkan sampai terjadi permusuhan antar pendukung satu dengan lainnya. Jadi meskipun berbeda pilihan, hendaknya tetap saling menghargai satu sama lain. Dalam istilahnya katanya hendaknya dibuat suasana yang santai.³⁴

8. Sawilem

Usia 68 tahun bekerja sebagai petani, kadang-kadang diselingi dengan berjualan gorengan. Wanita ini sudah ditinggal mati oleh suaminya sekitar 3 tahun silam. Tidak jelas bagaimana persepsinya tentang proses pemilihan Kepala Desa. Ibu ini tampak malu-malu dan hanya senyum-senyum ketika dimintai pendapatnya oleh penulis.

Berdasarkan pendapat delapan informan yang telah penulis wawancarai secara langsung tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa persepsi masyarakat Desa Kutasari khususnya yang berada di Wilayah RT 001 dan 002 RW 010, cukup variatif. Ternyata tidak semua informan bisa menginterpretasikan dengan baik, jelas, serta apa adanya tentang proses pemilihan Kepala Desa yang akan mereka hadapi. Terutama bila dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi dan rasakan mengenai kebijakan, program kerja maupun realisasinya di masyarakat dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya. Bisa saja ini

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi masing-masing informan, di mana ada yang memiliki sifat terbuka, tertutup, atau bahkan ada juga yang malu untuk mengutarakan pendapat.

Latar belakang lingkungan tempat tinggal yang cukup terisolasi sehingga tidak memahami masalah politik, tingkat pendidikan, dan situasi sosial politik menjelang diselenggarakan acara pemilihan Kepala Desa tersebut tentu saja cukup mempengaruhi. Oleh karena kebanyakan orang merasa ada tekanan sosial seperti munculnya rasa tidak nyaman bila pendapatnya diketahui orang lain, takut bila pendapatnya berbeda dengan orang sekelilingnya, dan lain sebagainya.

Orientasi Politik Masyarakat Desa Kutasari Pada Pemilihan Kepala Desa

Kecenderungan pengetahuan, perasaan dan keputusan politik masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kutasari Tahun 2013 dapat penulis gambarkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan diperoleh gambaran bahwa mayoritas lebih cenderung ke orientasi afektif, yaitu munculnya perasaan kurang diperhatikan dalam hal pembangunan sarana prasarana dibandingkan wilayah RW yang lain, sehingga merasa kurang diperlakukan secara adil oleh Pimpinan Desa, munculnya rasa kurang suka/kurang puas terhadap kepemimpinan Kepala Desa yang telah lalu, misalnya disebabkan adanya isu tentang penyelewengan dana bantuan pemerintah seperti dana Raskin, penanggulangan bencana alam, dana kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan bernama Siswanto:

“Kepala Desa yang lama terbukti tidak bisa membawa ke arah kemajuan, misalnya prasarana jalan yang rusak kurang mendapat perhatian, belum lagi isu-isu tentang korupsi yang dilakukan pejabat lama.”³⁵

Informan ini yang memiliki kecenderungan orientasi terhadap sistem politik Pemerintahan Desa yang dianggap kurang membawa menuju kemakmuran masyarakat, sehingga memilih untuk mencoblos calon yang baru.

Adapun Muhsinun juga mempunyai orientasi politik yang hampir sama yaitu memilih calon no 1 yaitu Kusnendar, bukan Kepala Desa yang lama dengan alasan kecewa karena: ‘Janji kampanye yang dulu adalah jika menang maka sebagian bengkaknya/ sawahnya di awal hasilnya akan disumbangkan ke masjid. Tapi ketika janji itu ditagih yang terjadi malah marah, belum lagi munculnya isu tentang penyimpangan dana bantuan semen dari pemerintah yang mestinya dibagikan ke RW untuk perbaikan pengecoran jalan malah kabarnya dijual.’³⁶

Meskipun kabar itu belum tentu kebenarannya, namun pada kenyataannya informan ini lebih cenderung ingin Kepala Desanya ganti yang baru.

Namun demikian, ada juga beberapa anggota masyarakat yang tertutup apabila dimintai keterangan, sehingga tidak bisa terbaca cenderung ke arah mana orientasi politik mereka. Seperti Sawilem, hanya senyum-senyum dan sepotong-sepotong kalimat saja yang disampaikan ke penulis. Munculnya rasa tidak enak apabila diketahui isi hatinya, atau tidak berani mengemukakan pendapat karena takut salah bicara, bisa saja menjadi alasan sehingga informan ini memilih untuk tidak banyak berkomentar.

SIKAP DAN PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA KUTASARI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2013

Gambaran keadaan internal yang mempengaruhi pilihan individu masyarakat Desa Kutasari dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2013 dapat diuraikan bahwa, sebagian besar masyarakat Desa Kutasari bersikap positif dan menyambut dengan baik adanya pemilihan Kepala Desa di wilayahnya. Hal tersebut dibuktikan antara lain adanya kecenderungan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial yang berkembang selama proses, mulai dari pendataan nama-nama daftar pemilih, masa kampanye hingga saat kegiatan pencoblosan tiba. Meskipun tidak semua masyarakat menunjukkan antusiasmenya dengan cara yang sama, misalnya ada yang aktif dalam kegiatan politik praktis misalnya menjadi anggota tim sukses salah satu dari ketiga calon, namun sebagian besar masyarakat menyambut proses pemilihan ini dengan hanya menjadi anggota masyarakat biasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan motivasi pada masing-masing individu masyarakat Desa Kutasari. Hal ini dapat dilihat antara lain dari sikap para informan di bawah ini.

Agus, informan yang satu ini memiliki kecenderungan sikap cukup antusias dan menghadapi proses pemilihan Kepala Desa Kutasari tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatannya secara aktif sebagai panitia TPS 9 bahkan sebagai salah satu tim sukses calon no 1 yaitu Kusnendar. Kebetulan yang berangkutan adalah Ketua RW 010. Kepada penulis, Agus menyatakan terus terang tentang prinsipnya bahwa “Tidak akan memilih calon kepala Desa yang pernah menjabat pada periode sebelumnya, alasannya khawatir akan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, disebabkan orang tersebut kalau sudah terpilih biasanya akan lebih memikirkan bagaimana agar bisa mengembalikan modal/biaya kampanye yang sudah dikeluarkan pada saat pencalonan dulu.”³⁷

Di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa informan ini sikap politiknya cukup jelas menunjukkan dukungannya terhadap salah satu calon yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada periode sebelumnya. Termotivasi munculnya rasa khawatir akan dampak negatif seperti memicu timbulnya tindak korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Persepsi masyarakat RW 010 RT 001 dan 002 Desa Kutasari Kecamatan Cipari kabupaten Cilacap, umumnya belum cukup memahami makna pemilihan Kepala Desa, terbukti mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik ketika ditanyakan masalah tersebut. Hal ini tidak terlepas dengan karakteristik masing-masing individu sebagai akibat dari pengaruh agama, tingkat pendidikan, lingkungan sosial langsung yang mereka rasakan dan hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melakukan kegiatan memilih, orientasi terhadap sistem politik, mayoritas masyarakat Desa Kutasari cenderung mengarah pada orientasi kognitif dan afektif, namun mayoritas berorientasi afektif, belum tampak yang cenderung berorientasi evaluatif. Orientasi kognitif yaitu hampir setiap warga masyarakat melakukan kegiatan memilih Kepala Desa atas dasar pengetahuan pemahaman sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban selaku warga negara untuk memilih Kepala Desa, sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimilikinya, meskipun tidak sama tergantung tingkat pendidikan serta lingkungan tempat tinggal mereka.

Kebanyakan masyarakat berpendidikan menengah keatas cenderung berorientasi- kognitif bercampur afektif. Adapun masyarakat berpendidikan menengah ke bawah cenderung berorientasi afektif dan melihat para calon Kepala Desa yang akan dipilih itu adalah orang yang betul-betul dikenal, domisilinya dekat dengan rumahnya. Sebagian besar yang lainnya juga melihat apakah calon tersebut benar-benar bersifat merakyat atau tidak. Jadi bukan berdasar kemampuan intelektual atau atau program yang ditawarkan calon tersebut baik atau tidak, melainkan melihat apakah si calon itu menunjukkan kebiasaan seperti rajin mendatangi hajatan, melayat, menengok orang sakit, dan tindakan-tindakan sosial lainnya yang dianggap “merakyat”.

Adapun orientasi-afektif terdapat pada masyarakat terutama karena ada sebagian yang menganggap bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah desa selama ini belum sepenuhnya memuaskan. Misalnya sebagian masyarakat masih merasakan adanya ketidakberesan dalam mengurus

Bantuan Langsung Tunai, isu penyimpangan alokasi dana bantuan bencana alam, dan lain-lain sehingga mendorong masyarakat untuk menentukan sikap dan perilaku politik yang berbeda-beda dalam proses Pemilihan Kepala desa.

ENDNOTES

¹ Febasfi.blogspot.com>politik, 8 Desember 2012 , diakses 7-3- 2013.

² *Ibid.*

³ Ambowetan.unsri.ac.id/...dinamika_politik_pilkades_di era otonomi daerah

⁴ Data: hasil wawancara dengan salah satu Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP), wilayah TPS 9, Tanggal 16 Februari 2013.

⁵ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 173.

⁶ Aminudin, *Kekuatan Islam atau Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto* (Yogyakarta: 1999), hlm. 49.

⁷ Etta Mamang Sangadji, op.cit., hlm. 176.

⁸ Aminudin, op.cit., hlm. 49.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Statistik 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 226.

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

¹³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

¹⁵ Noeng Muhadjir, op.cit., hlm. 36.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 167.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Edikusmayadi.blogspot.com/2012/04/perilaku.politik.pemilih.html, diakses pada 5 Maret 2013.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Edy Kusmayadi, *Perilaku Politik/Pemilih*, id.wikipedia.org/wiki/Teori_Perilaku_Politik, diubah terakhir 24 Februari 2013, diakses tanggal 27 Februari 2013.

²¹ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 87.

²² Ramlan Surbakti, op.cit., hlm. 169.

²³ Ramlan Surbakti, op.cit., hlm. 169-170.

²⁴ respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/chapter%2011.pdf

²⁵ Id.scribd.com/doc/49763302/pengertian-sikap-dan-perilaku, diakses 28 Agustus 2013.

²⁶ Setebasri01.blogspot.com/2009/02/budaya-dan-sosialisasi-politik.html, diakses 27 Agustus 2013.

²⁷ *Ibid.*

- ²⁸ Wawancara, bulan Februari 2013.
²⁹ Wawancara, Februari 2013.
³⁰ Wawancara, Maret 2013.
³¹ Wawancara, Februari 2013.
³² Wawancara, Februari 2013.
³³ Wawancara, Maret 2013.
³⁴ Wawancara, Maret 2013.
³⁵ Wawancara Maret 2013
³⁶ Wawancara, Maret 2013.
³⁷ Wawancara, Februari 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Ambowetan.unsri.ac.id

Aminudin. 1999. *Kekuatan Islam atau Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto*. Yogyakarta:TP.

Data: hasil wawancara dengan salah satu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), wilayah TPS 9, Tanggal 16 Februari 2013.

Edikusmayadi.blogspot.com

Febasfi.blogspot.com

Hadi, Sutrisno. 1991. *Statistik 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jaros, Dean *et al.* 1974. *Political Behavior, Choices and Perspectives*. New York: St. Martin's Press.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mufti, Muslim. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nasir, Moh. 1985. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
respository.usu.ac.id

Sangadji, Eтта Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Setebasri01.blogspot.com

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tholkhah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia, Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.